



BAB X

PENUTUP

THE
Character Building
UNIVERSITY

PENUTUP

A Catatan Akhir

Bahwa, berbagai realisasi atas program pembangunan pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar selama kurun waktu 2005-2009 sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, selain telah mengesankan berbagai keberhasilan yang patut dibanggakan, ternyata juga masih menyisakan beragam hal yang perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan dan perlu dilanjutkan.

Upaya pembinaan Taman Kanak-Kanak, misalnya masih dihadapkan pada berbagai persoalan, antara lain masih banyaknya jumlah penduduk yang belum berpartisipasi dalam pendidikan Taman Kanak-Kanak dan masih tingginya disparitas pendidikan taman kanak-kanak antara perkotaan dan pedesaan.

Data sebagaimana diuraikan dalam bab 6, menunjukkan bahwa lembaga TK di Indonesia seluruhnya berjumlah **69.536 TK** terdiri dari **95% TK Swasta**, **2% TK Negeri**, dan **3% TK-SD Satu Atap**. Dengan jumlah itu kenyataannya belum mampu memberikan kesempatan kepada semua anak usia 4 - 6 tahun untuk memperoleh layanan pendidikan TK.

Data Pusat Statistik Pendidikan (PSP), Balitbang, Depdiknas 2009 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) TK sebagai indikator dari jumlah anak usia TK yang tertampung di lembaga ini baru mencapai 40,50%. Disamping itu data pada tahun yang sama menunjukkan Disparitas APK TK antara Kabupaten dan Kota sebesar 11,07% yang berarti masih terjadi kesenjangan yang cukup tinggi antara pendidikan TK di daerah Perkotaan dan Kabupaten.

Oleh karena itu pemerintah melalui Direktorat Pembinaan TK dan SD memberikan perhatian yang intensif terhadap pendidikan Taman Kanak-Kanak. Program-program nyata telah direalisasikan antara lain pembangunan TK Negeri Kecamatan dan penyelenggaraan TK-SD Satu

Atap di pedesaan. Program Pembangunan TK Pembina Kecamatan yang digulirkan sejak tahun 2004, sampai saat ini sudah mencapai 740 unit di 33 Provinsi. Jumlah ini perlu terus ditingkatkan pada masa-masa mendatang sehingga mencapai target "1 (satu) TK Pembina setiap Kecamatan". Sedangkan penyelenggaraan TK-SD Satu Atap yang digulirkan sejak tahun 2004, hingga saat ini jumlahnya telah mencapai 2.129 unit di 33 Provinsi. Program yang dianggap sebagai embrio TK pedesaan ini, ke depan diharapkan menjadi lokomotif yang dapat mendorong APK TK. Dengan inspirasi ini, tidak berlebihan kiranya jika dimunculkan gagasan penyelenggaraan program "Sejuta TK Pedesaan" pada periode pembangunan berikutnya.

Demikian pula dengan pembinaan sekolah dasar, beragam persoalan masih perlu dipecahkan. Secara Nasional tingkat capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD tahun 2009 sebesar 95,23%. Berdasarkan indikator APM, tingkat ketuntasan wajar SD secara Nasional sampai dengan tahun 2008 sangat menggembirakan dimana terdapat 98% kab/kota telah tuntas, sedangkan yang belum tuntas masih tersisa 7 Kabupaten (2%).

Sampai tahun 2008 angka putus sekolah jenjang sekolah dasar (SD) masih sebesar 1,7%. Walaupun dalam bentuk persentase tampak kecil, namun angka absolut angka putus sekolah ternyata cukup besar, yaitu sekitar 440.640 siswa. Oleh sebab itu upaya-upaya menekan angka putus sekolah perlu dilanjutkan melalui program BOS, pemberian beasiswa bagi siswa miskin, penyediaan layanan pendidikan alternatif bagi siswa yang rentan dan telah putus sekolah serta kampanye pendidikan.

Disparitas APK SD antara daerah perkotaan dan kabupaten sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan wajar dikdas lainnya perlu diupayakan untuk semakin menurun angkanya. Sampai dengan tahun 2009 dispartitas APK SD/setara masih sebesar 2,01%. Angka ini diharapkan akan terus menurun pada periode pembangunan mendatang. Oleh sebab itu pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau seperti masyarakat miskin, tinggal di wilayah pedesaan, terpencil dan kepulauan perlu terus ditingkatkan.

Persoalan penuntasan kerusakan gedung sekolah dasar adalah merupakan salah satu program pokok nasional setelah tercapainya program wajib belajar pendidikan dasar tingkat sekolah dasar. Sampai dengan tahun 2009 pemerintah melalui program DAK telah mengucurkan dana 27 Trilyun untuk menuntaskan kerusakan gedung sekolah dasar. Hasilnya sampai dengan saat ini, sisa kerusakan yang ada boleh dianggap sudah tidak signifikan dan **diharapkan dapat di atasi oleh pemerintah daerah**. Dengan demikian, fokus pembangunan pendidikan sekolah dasar terutama program-program pendanaan massal seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan

pembinaan pendidikan sekolah dasar melalui APBN, mulai tahun 2010 **diarahkan untuk peningkatan mutu pendidikan.**

Sebagaimana diketahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, yang salah satu variabelnya adalah mutu pendidikan, berada di urutan 111 dari 182 negara (data tahun 2009). Ini merupakan resultante dari banyak faktor: pembiayaan, pengawasan, kurikulum, birokrasi pendidikan, bahkan juga kondisi sosial ekonomi dan politik secara umum. Sebenarnya potensi anak-anak sekolah di Indonesia cukup tinggi, ini misalnya ditandai dengan keberhasilan menjuarai olimpiade dan kompetisi internasional di bidang sains, matematika dan olahraga. Keberhasilan anak-anak SD dalam berbagai olimpiade tersebut merupakan indikator bahwa sesungguhnya bangsa ini memiliki harapan dan peluang besar untuk menjadikan sekolah-sekolah mampu menghasilkan lulusan bermutu dan memiliki daya saing tinggi.

Inilah berbagai persoalan yang masih harus diperjuangkan dan diupayakan untuk dapat diselesaikan.

B Visi dan Misi Pendidikan Periode 2010-2014

Pada akhir program lima tahunan (2005-2009) ini, Pemerintah melalui Depdiknas akan terus melanjutkan program pendidikan pada fase lima tahun berikutnya (2010-2014) dengan cara melengkapi program yang masih kurang, belum tercapai dan mempertahankan serta meningkatkan program yang telah dicapai dengan baik.

Dalam Rencana Strategis (2010-2014), Depdiknas telah menetapkan Visi 2014, yaitu: "Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif ". Untuk mencapai visi tersebut, Misi Departemen Pendidikan Nasional 2010-2014 dikemas dalam "Misi 5K" sebagai berikut.

- M1** Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan (artinya tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara)
- M2** Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan (artinya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat)
- M3** Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan (artinya berkualitas dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha dan dunia industri)
- M4** Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan (artinya: setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, dan sebagainya)

- M5** Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan (artinya: memberikan kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri)

C Rekomendasi

Bertitik tolak dari catatan akhir serta Visi dan Misi Depdiknas 2010-2014, sebagai sebuah bentuk rekomendasi, kebijakan pembangunan pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar dalam 5 (lima) tahun mendatang, seyogyanya diarahkan untuk:

1. Meningkatkan perluasan akses bagi anak usia 4-6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan sekolah dasar. Kegiatan lebih diarahkan untuk memberikan dukungan atau pemberdayaan bagi terselenggaranya pelayanan TK yang bermutu oleh masyarakat secara merata di seluruh pelosok tanah air. Subsidi *blockgrant* atau imbal swadaya merupakan salah satu alternatif program yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan;
2. Membentuk TK-SD Satu Atap dan TK Pedesaan bagi daerah pedesaan dan daerah terpencil yang memiliki banyak penduduk usia TK, namun belum memiliki lembaga pendidikan TK, dengan menambahkan atau membangun USB/RKB TK untuk menyelenggarakan program pendidikan TK. Untuk mengatasi kesulitan tenaga pengajar dalam kebijakan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan guru SD untuk mengajar di TK serta meningkatkan kompetensi guru. Selain itu, dilakukan upaya memaksimalkan fasilitas yang sudah ada, baik ruang kelas maupun bangunan SD;
3. Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memenuhi hak dasar warga negara. Untuk itu upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan lulusan SD yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP serta upaya menurunkan angka putus sekolah harus semakin dioptimalkan dengan menambah sasaran sekolah penyelenggara Kelas Layanan Khusus (KLLK) di daerah-daerah yang masuk *selected area*;
4. Menghapus hambatan biaya (*cost barriers*) dengan terus melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi

semua siswa pada jenjang sekolah dasar serta meneruskan program beasiswa bagi siswa miskin dalam rangka melengkapi kebutuhan biaya personal siswa yang tidak dapat dipenuhi melalui dana BOS;

5. Menurunkan angka putus sekolah khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD melalui rintisan program-program yang inovatif. Untuk itu peningkatan mutu program calistung perlu dilakukan selain juga menciptakan program-program lain yang sejenis;
6. Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan, masyarakat di daerah konflik, dengan mengembangkan program-program pembinaan SD di daerah terpencil/kepulauan;
7. Menyelenggarakan pendidikan alternatif di wilayah konflik dan bencana alam yang diikuti dengan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak termasuk penyiapan peserta didik untuk dapat mengikuti proses belajar mengajar;
8. Mengembangkan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal termasuk pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup;
9. Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan multikultural guna menumbuhkan wawasan kebangsaan dan menyemaikan nilai-nilai demokrasi dengan cara memantapkan pemahaman nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan inklusif dalam rangka meningkatkan daya rekat sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;
10. Menyediakan materi dan peralatan pendidikan (*teaching and learning materials*) terkini baik yang berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan alam sekitar;
11. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan terutama buku pelajaran dan buku penunjang laboratorium, perpustakaan, ruang praktek, sarana olah raga, sarana ibadah, dan sarana pendidikan lainnya dalam rangka mencapai mutu pendidikan sesuai dengan SNP;
12. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan.

Pemasangan internet di sekolah dasar merupakan salah satu alternatif program yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan;

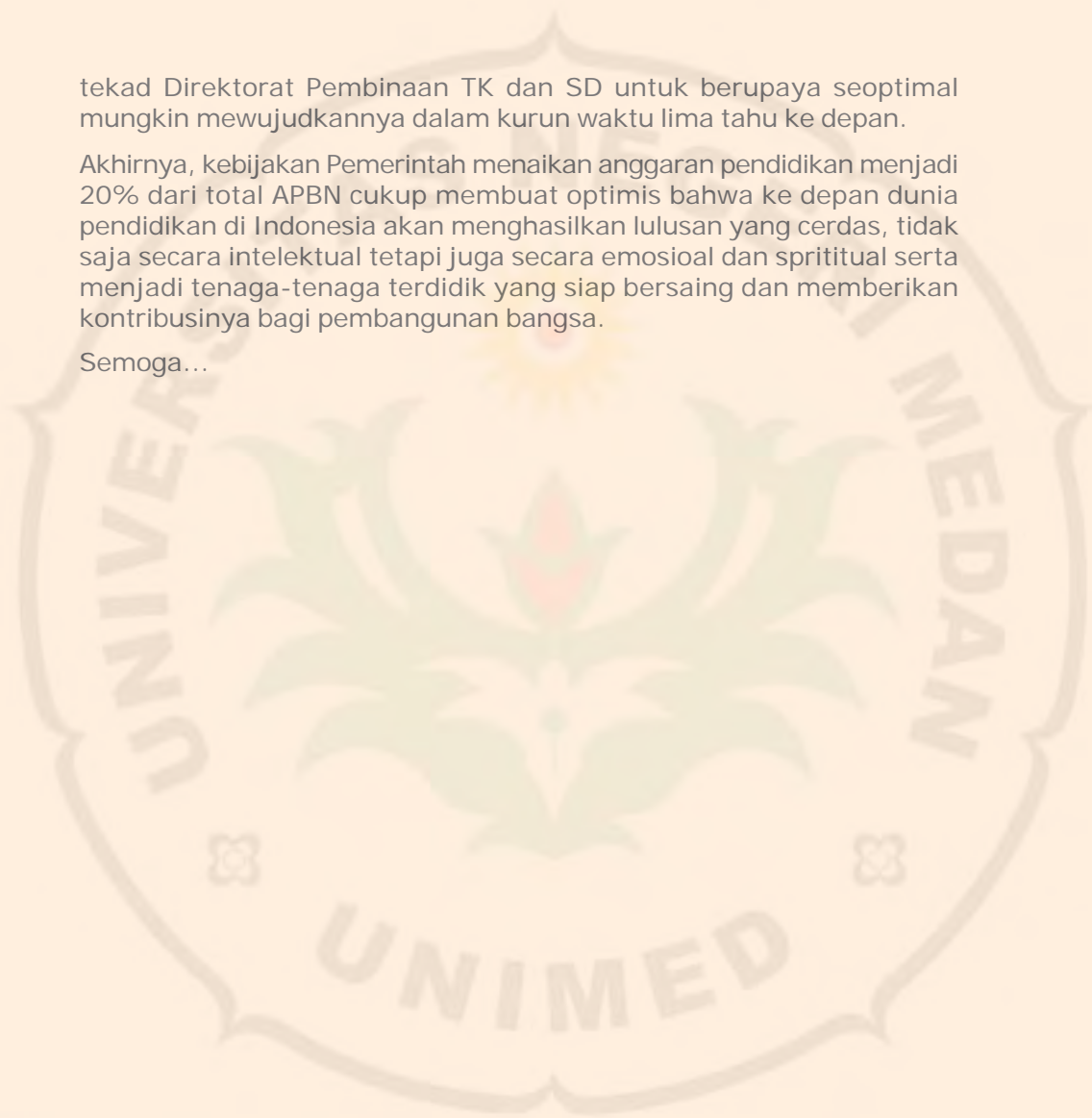
13. Pengembangan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Setiap Kabupaten/Kota, perluasan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal oleh pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 20/2003 yang secara bertahap akan dikembangkan pada setiap provinsi dan kabupaten/kota. Dalam lima tahun ke depan, diharapkan terdapat sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan SD di setiap kabupaten/kota;
14. Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI) perlu diperluas sampai seluruh Kabupaten/Kota memiliki sekurang-kurangnya satu RSDBI, serta mendorong RDSBI mencapai untuk meningkatkan daya saing bangsa, perlu dikembangkan sekolah bertaraf internasional pada tingkat kabupaten/kota melalui kerja sama yang konsisten antara pemerintah dengan pemerintah kabupten/kota yang bersangkutan;
15. Mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan nasional pada satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan, serta evaluasi terhadap penyelenggara pendidikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional;
16. Menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif yang dilandasi oleh standar pelayanan minimal serta meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat;
17. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
18. Meningkatkan sistem pengelolaan pendidikan melalui peningkatan manajemen berbasis sekolah melalui optimalisasi peran Komite Sekolah/Madrasah serta komite satuan panduan pendidikan lainnya termasuk dewan pendidikan dan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri.

Demikian beberapa hal yang dapat dikemukakan pada bagian akhir bab ini, baik sebagai suatu simpulan, maupun harapan dan sekaligus

tekad Direktorat Pembinaan TK dan SD untuk berupaya seoptimal mungkin mewujudkannya dalam kurun waktu lima tahu ke depan.

Akhirnya, kebijakan Pemerintah menaikkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari total APBN cukup membuat optimis bahwa ke depan dunia pendidikan di Indonesia akan menghasilkan lulusan yang cerdas, tidak saja secara intelektual tetapi juga secara emosioal dan sprititual serta menjadi tenaga-tenaga terdidik yang siap bersaing dan memberikan kontribusinya bagi pembangunan bangsa.

Semoga...



THE
Character Building
UNIVERSITY



Tari tradisional dari DKI Jakarta pada pembukaan penyelenggaraan APPSO tahun 2007 di Jakarta.



THE
Character Building
UNIVERSITY

Daftar Rujukan

Anam, Syaiful, *"Sekolah Dasar Pergulatan Mengejar Ketertinggalan"*, PT. Wangsa Jatra Lestari, Solo, 2006.

_____, *"Jangan Remehkan Taman Kanak-kanak Taman Yang Paling Indah"*, PT. Wangsa Jatra Lestari, Solo, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *"Pembangunan Pendidikan Nasional 2005-2007: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Departemen Pendidikan Nasional"*, Jakarta, 2007.

_____, *"Pembangunan Pendidikan Nasional 2005-2008: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Departemen Pendidikan Nasional"*, Jakarta, 2008.

_____, *"Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009"*, Jakarta, 2005.

Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, *"Prestasi Siswa TK/SD pada Olimpiade dan Kompetisi Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2008"*, Jakarta, 2008.

_____, *"Panduan Pelaksanaan Bantuan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina"*, Jakarta, 2009.

_____, *"Pedoman Bant System Manajemen Mutu ISO: 2008 Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional"*, Jakarta, 2009.

_____, *"Potret Kabupaten/Kota berdasarkan capaian hasil UASBN Tahun 2008"*, Jakarta, 2008.

_____, *"Potret Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan capaian Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Tahun 2009"*, Jakarta, 2009.

_____, *"Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Tahun 2005-2009"*, Jakarta, 2005.

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,
Departemen Pendidikan Nasional, *"Pembangunan Pendidikan
TK & SD"*, Jakarta, 2009.

_____, *"Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun
2005"*, Jakarta, 2005.

_____, *"Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun
2006"*, Jakarta, 2006.

_____, *"Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun
2007"*, Jakarta, 2007.

_____, *"Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun
2008"*, Jakarta, 2008.

_____, *"Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun
2009"*, Jakarta, 2009.

_____, *"Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Pendidikan Tahun 2005"*, Jakarta, 2005.

_____, *"Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Pendidikan Tahun 2006"*, Jakarta, 2006.

_____, *"Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Pendidikan Tahun 2007"*, Jakarta, 2007.

_____, *"Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Pendidikan Tahun 2008"*, Jakarta, 2008.

_____, *"Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Pendidikan Tahun 2009"*, Jakarta, 2009.

_____, *"Rencana Strategis Direktorat Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2005-2009"*, Jakarta,
2005.

Kementerian Negara Perencanaan/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, *Laporan Pencapaian Millenium Development Goals
Indonesia*, Jakarta, 2007.

Stalker, Peter, *Kita Suarakan MDGs demi Pencapaiannya di Indonesia*.
Kementerian Negara Perencanaan/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan UNDP, Jakarta, 2008.

Indeks

Aadvokasi kurikulum 37

advokasi 34

Akreditasi 9

aktif 22

aktivitas 2, 65

Aktualisasi 125 (dalam mengaktualisasi)

akuntabel 20, 29, 75

akuntabilitas publik 54, 121

akuntabilitas 20, 23, 29, 31, 42, 50, 73, 252

Alternatif 31, 35

Amandemen 42

Anggaran pendidikan 54

Anggaran 54, 55 (dalam tabel 5.1 ; grafik), 56 – 58 (dalam grafik), 59, 60 (dalam grafik)

Angka Partisipasi Kasar (APK) 44

angka partisipasi murni (APM) 4, 5

aplikasi tutorial 23

APM 4, 5, 21

Asean Primary School Sports Olympiad (APSSO) 49, 232

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 47

Bantuan biaya operasional (BOS) 21, 43, 85

Basic Education Project 78

basic learning contents 22

Beasiswa 81- 84

Bencana alam 280

Berinisiatif 22

Berpikir analitik 228

Berpikir kritis 228

Block grant 33, 73, 108, 121, 140, 142

Catchment Area 93 (dalam diagram)

Centralization 34

Community role 36

Competency based 34

Curiosity 246

Dampak Program BOS 87

Dana alokasi khusus (DAK) 43, 46, 76

Daya saing 19, 22, 42, 46, 73

Debt swap 46, 74, 75, 79, 246, 247, 284

Decentralization 34

Dekonsentrasi 46

Demand side 19

Desentralisasi 2, 29, 35

Desentralistik 2, 121

Deviasi 4

Dewan Pendidikan (DP) 23

Education for All (EFA) 83

Efektif 22, 29

Efektivitas 31, 75

Efisiensi 54, 75, 121, 252

Ekstensifikasi 42

Emis (*Education Management*

Information Systems) 23, 24, 145

Existing Developed 48, 129

Extended classes 21

Fair play 224, 225, 226, 227

Fasilitatif 34, 36

Feasible 285

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 49, 111, 192, 193

Fundamental 4

Gabungan Organisasi Penyelenggara

Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI)

35, 117, 118

Good governance 2, 23

Governance 4

Government 36

Guru Sekolah Dasar (PGSD) 145

Identifikasi 4

IGTKI 35

Ikatan Guru Taman Kanak-kanak

Indonesia-Persatuan Guru Republik

Indonesia (IGTKI-PGRI) 119

Implementasi sistem 23
Indikator 38
Indonesia Sains Festival (ISF) 49
Informal 42
Infrastruktur Jaringan 249
Inspiratif 22
Instruktif 34, 36
Intensifikasi 42
Interaktif 22
International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) 49, 216, 229
Intervensi program 102
Isu globalisasi 4
Isu otonomi 4

Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN) 87
Kapasitas institusi 19
Kapasitas profesi 22
Kapasitas 19, 23
karakteristik 22, 107
Kelas Layanan Khusus (KLK) 64, 92
kinerja 33, 38
Knowledge 34, 36
Komite Sekolah (KS) 23
Komitmen 4
komponen pendidikan 219
Komprehensif 46
Konsolidasi 35, 38
Konvensi Hak Anak (KHA) 280
Koordinator Daerah (Korda) 145
Kreatif 22
Kreativitas 12, 13, 34, 37, 110, 111, 228
Kualitas 34
kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 47, 141
Kurikulum 8, 9, 19, 22, 31

Learning tool 23
Learning 34, 36
Life skill 37, 228

M*aintenance and Repair (MR)* 151, 153
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 121, 186
Mandiri 22
Masa peka 107
Memprioritaskan 54
Mental-emosional 3
Millenium Development Goals (MDGs) 83
Model pembelajaran 107
Monitoring 35, 38
Motivasi 22 (dalam memotivasi)
Multigrade Teaching 94
Multikultural 109

N*ewly developed* 48
Nonformal 42

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 49, 215, 219, 220
Olimpiade Sains Nasional (OSN) 49, 215
Optimalisasi 34, 37
Otonomi 2

Paradigma 36
partisipasi 20, 23, 34, 37
Partisipatif 35, 38
Paud 18, 19, 20
Pelatihan Asisten Manajemen Pelatihan (AMP) 145
Pelatihan *Maintenance and Repair (MR)* 145
Pemberdayaan 10
Pembinaan kepribadian 109
pencitraan Publik 20, 23, 73
Pendekatan Satu Sekolah (PSS) 145
Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) 18
Peningkatan mutu, 22, 33
Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 145
PERDA 35
Persentase penduduk 28
PGRI 35
Phobia 66
potensi 2, 3, 22
potensi anak 3
prestasi 12, 13
prioritas 30, 54
Profesionalisme 29, 33
Psikologis 22

R*eaching the unreached* 42
Reformasi pendidikan 2
reformasi tata pemerintahan 2
Reformasi 2, 42
Regrouping 38
Rehabilitasi 3, 21, 30, 46, 74, 79, 80, 252, 280, 281
Rekapitulasi 71
Rekonstruksi 30
Relevansi 19, 22, 30, 31, 32, 33, 42, 46, 73
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 18
Renstra 28
Retrievl treatment 97
Retrievl 32
Reward 38
Rintisan SBI 124
Rintisan SDSN 124
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) 48, 123
Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) 123
Role play 108 (dalam keterangan gambar)
Ruang Kelas Baru (RKB) 21, 64

- S**arana prasarana 11, 32, 49 (dalam gambar), 74
Schooling 34, 36
Science Education Quality Improvement Project (SEQIP) 145, 246
Scientific methods 145
SD SPM 123
SDSN 124, 127
Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) 123
Sekolah darurat 280
Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN) 48
Sekolah Standar Nasional (SSN) 123
Sense of science 246
Sentralistik 121
Sentralistik 2
Sertifikasi ISO 50
Signifikan 23
Sisdiknas 2
Sistem Gugus 115, 149
Sistem Informasi Manajemen (SIM) 50, 249
Sistem insentif 38
Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) 100
SNP 5, 24
Sosialisasi 34, 37
Sosiokultural 22
Span of control 246
Strategi 30, 31
Stake holder 47, 69, 142
Standar kompetensi 22
Standar Nasional pendidikan (SNP) 5, 123, 141
Standar Pelayanan Minimal (SPM) 117, 123
Strategis 2, 3, 4, 5, 27,28
Sumberdaya 19
Sustainability 4
Sustainability 148
- T**ata kelola 20, 23, 42, 50, 73
Terintegrasi 2
TK Pembina Kecamatan 68, 69 (dalam keterangan gambar), 70, 71
TK-SD Satu Atap 66, 67 (dalam keterangan gambar ; dalam tabel 6.2), 68 (dalam keterangan gambar)
Training of Trainer (ToT) 116
Transparan 75
Transparansi 35, 54, 121
Trickle down effect 75
Tupoksi 5
- U**ASBN 173, 174, 175 (dalam keterangan tabel 7.27), 176, [177,179, 181, 183 (dalam keterangan grafik), 178,180, 182 , 184, 185
Unit Gedung Baru (UGB) 64
Unit Sekolah Baru (USB) 21
- V**oucher 83
- W**orkstation 249
Workstation 50



THE
Character Building
UNIVERSITY